

**PERAN PEMERINTAH KULON PROGO DALAM MENGATASI
KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PT JOGJA MAGASA IRON (JMI)
DENGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata I

disusun oleh:

Rudi Sanjaya

NIM 11230005

Pembimbing

Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si

NIP 19780717 200901 1 012

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 telp. (0274) 515856 fax. (0274)
e-mail : fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/0197/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH KULON PROGO DALAM MENGATASI
KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PT JOGJA MAGASA IRON (JMI)
DENGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rudi Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 11230005
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 20 Mei 2015
Nilai Munaqosyah : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si
NIP.19750701 200501

Penguji II

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001

Penguji III,

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Yogyakarta, 20 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP.19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 515856 fax. (0274)
552230 Yogyakarta 55281 Email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assallamu'allaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Rudi Sanjaya
NIM : 11230005
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Islam.

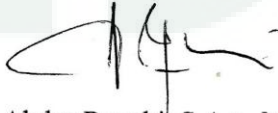
Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallamu'allaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam


M. Fajrul Munawir M. Ag.
NIP. 1967014 199303 1 003

Yogyakarta, 20 Januari 2014
Pembimbing


Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP 19780717 200901 1 012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Sanjaya
NIM : 11230005
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul PERAN PEMERINTAH KULON PROGO DALAM MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PT JOGJA MAGASA IRON (JMI) DENGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian – bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Maret 2015

Yang menyatakan



Rudi Sanjaya

NIM 11230005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohim

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Almamaterku tercinta..... UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua Orang Tua Ku yang selalu mendoakanku memberi dukungan

motivasi dengan penuh cinta hingga skripsi ini bisa terselesaikan

Kepada adik-adiku yang paling kusayangi yang selalu memberikan

dukungan yang membuat saya semakin bersemangat.

MOTTO

Dengan Seni Hidup Akan Terasa Indah

Dengan Ilmu Hidup Terasa Mudah

Dengan Agama Hidup Akan Terarah

(Ki Santoso Sejati)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan kenikmatan kepada makhluknya dengan penuh cinta, sehingga dengan Rahmat dan HidayahNya senantiasa tercurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhirnya, shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kemuliaannya akan senantiasa menghiasi sejarah peradaban.

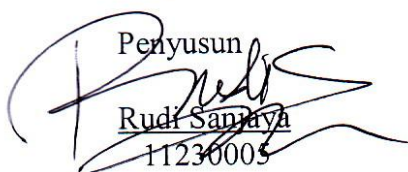
Berkat segala usaha dan do'a kerja keras dan air mata akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dalam kesempatan ini setulus hati penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta para jajaran Pejabat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta parajajaran Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak M Fajrul Munawir M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abdur Rozaki S.Ag.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi terimakasih atas segala masukan, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga beserta staf-stafnya, terimakasih yang tak terhingga atas pengetahuan dan pelayanannya.
6. Kedua orang tuaku Saiman dan Suyanti keluarga besar mbah Kamdi Sumarto yang selalu mengajarkan do'a, motivasi dan usaha dalam setiap nafas, pengharapan dan pengorbanan yang tucurahkan kepada Ku terimakasih karena kasih sayang dan dukungannya.
7. Untuk teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Angkatan 2011, terutama yang mendorong dan membantu dalam menyelesaikan skripsi seperti Istu, Aziz, Zulfa, Nia, Regal, Ipul, Tika, Hendra dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan.
8. Seluruh pihak-pihak baik Pemerintah Daerah seperti Bapak Bupati Hasto Wardoyo, Bapak Mustofa Ali Muhammad Kepala Bagian Pertambangan, Bapak Wasul Khasani selaku Kepala Desa Karangwwuni beserta Stafnya, bapak Sukarman, mas Dodi dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut membantu sehingga tugas akhir dapat diselesaikan.

Hanya ungkapan doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta

Penyusun

Rudi Santaya
11230005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*PERAN PEMERINTAH KULON PROGO DALAM MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PT JOGJA MAGASA IRON (JMI) DENGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP)*”, dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana peran yang dilakukan Pemerintah Kulon Progo dalam mengatasi konflik tersebut baik strategi yang dilakukan dan resistensi PPLP terhadap kebijakan penambangan pasir besi dan hasilnya.

Penelitian ini didasari dengan teori *Rational Choice* yang melatarbelakangi seseorang mengambil keputusan, dan strategi dalam menyelesaikan konflik seperti *Contending* (Perdebatan), *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), *Yeilding* (Pihak salah satu mengalah), *Inaction* (Didamaikan), dan *Withdrawing* (salah satu menarik diri secara permanen dari konflik). Selain itu dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan dua cara dalam pengendalian sosial dilihat dari prosesnya yaitu Persuasif dan Koersif . Dalam memecahkan masalah menurut teori juga dapat menggunakan peran-peran seperti peran memfasilitasi (*facilitatif roles*), peran mendidik (*educational roles*), peran tehnik (*technical roles*) dan peran representatif (*representational roles*). Metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif yang menggambarkan sasaran penelitian secara apa adanya, menganalisa data yang telah terkumpul dalam pengumpulan data, yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik Pemerintah Desa yaitu Bapak Wasil Khasani selaku Lurah Desa Karangwuni, Pemerintah Daerah yaitu Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo dan ESDM yaitu Bapak Mustofa Ali Muhammad selaku Kepala bidang Pertambangan, selain itu yang berkaitan seperti pihak Kepolisian seperti (Babinkamtibmas), Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Bapak Sukarman Sekjen PPLP dan masyarakat sekitar

Hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) yaitu dimana pemerintah dalam peranya melakukan meliputi peran memfasilitasi dan peran representatif dengan dilakukanya berbagai strategi-strategi penyelesaian konflik meliputi kerja sama kepada PT JMI menggunakan dua jalur yaitu *pertama*, jalur pendekatan Hukum (politik) yang dalam prosesnya secara koersif baik kepada pihak yang melanggar aturan maupun perjanjian yang sudah dibuat. *Kedua*, jalur pendekatan Moral (manusiawi) yang dalam prosesnya secara persuasif seperti melakukan gotong royong bersama, panen bersama, bahkan sholat berjama'ah bersama ketika melancarkan sosialisasi dan penjelasanya mengenai kemanfaatan adanya penambangan pasir besi. Dengan usaha tersebut desa Karangwuni dapat menerima bahkan mendukung dengan adanya penambangan pasir besi.

Kata kunci : Peran Pemerintah dan Strategi Penyelesaian konflik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengesahan Judul.....	1
B. Latar Belakang masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II PROFIL DAERAH DAN KEBIJAKAN PENAMBANGAN PASIR

BESI.....	30
A. Potensi Kabupaten Kulon Progo.....	30
B. Profil Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).....	44
C. Profil PT Jogja Magasa Iron (JMI).....	55
D. Kebijakan Penambangan Pasir Besi.....	64
BAB III POLA RELASI PEMERINTAH, JMI, DAN PPLP.....	65
A. Resistensi PPLP terhadap Kebijakan Penambangan Pasir Besi	65
1. Resistensi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).....	65
2. Latar Belakang Penerimaan dan Penolakan	72
3. Keterlibatan pihak luar.....	74
4. Pengorganisasian masa.....	78
5. Kolaborasi Kerjasama Pemerintah dengan PT JMI.....	81
B. Strategi Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah.....	82
1. Strategi Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah Desa.....	82
2. Strategi Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah Daerah....	88
3. Strategi Penyelesaian Konflik oleh Kepolisian.....	101
C. Hasil Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).....	105
BAB IV PENUTUP.....	107
A. KESIMPULAN.....	107
B. SARAN-SARAN.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Daftar struktur pemerintahan Desa Karangwuni.....	40
TABEL 2	Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	41
TABEL 3	Daftar Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
TABEL 4	Daftar Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian.....	42



DAFTAR BAGAN

BAGAN 1	Susunan Kepengurusan Paguyuban Petani Lahan Pantai.	47
BAGAN 2	Struktur Perusahaan Indomines Limited.....	57
BAGAN 3	Tahapan Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo.....	63
BAGAN 4	Pemetaan Konflik Agraria di Kulon Progo.....	77
BAGAN 5	Tahapan Pengorganisasian Masa Oleh PPLP.....	80
BAGAN 6	Proses AMDAL	94
BAGAN 7	Alur Strategi Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Daerah.....	99

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Peta Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo....	23
GAMBAR 2	Peta wilayah kawasan Kecamatan Wates.....	35
GAMBAR 3	Peta wilayah Desa Karangwuni Kecamatan Wates.	39
GAMBAR 4	Surat Keramat Paguyuban Petani Lahan Pantai.....	52
GAMBAR 5	Kawasan Pertambangan Pasir Besi.....	58
GAMBAR 6	Gambaran Dari Sisa Penambangan Pasir Besi.....	61
GAMBAR 7	Mesin Konsentrat Milik PT JMI.....	62
GAMBAR 8	Penolakan warga atas proyek tambang pasir besi di Kulonprogo.....	67
GAMBAR 9	Aksi demo penolakan pasir besi di Kulon Progo...	68
GAMBAR 10	Aksi penolakan penambangan pasir besi oleh Repdem.....	76
GAMBAR 11	Surat Keputusan Penggunaan Lahan yang dikeluarkan Pakualam.....	90
GAMBAR 12	Keamanan Kepolisian saat terjadi kerusuhan.....	102
GAMBAR 13	Pengamanan aksi penolakan Pasir Besi oleh Kepolisian.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)*” untuk menghindari kesalahan dan perbedaan pemahaman terhadap pengertian judul skripsi tersebut, maka diperlukan penjelasan dan pembatasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

Peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat.¹ Peran pada dasarnya menuntut pelakunya untuk selalu melakukan apa yang diperankanya hal tersebut dapat menjadi tolak ukur atau penilaian pada orang tersebut. Sedangkan pemerintah sendiri Menurut Makrus dkk merupakan sebuah organisasi yang dimana mengatur dan memimpin suatu negara.² Berarti peran pemerintah merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dalam mengatur dan memimpin negara. Dalam penelitian ini peran pemerintah yang ditonjolkan adalah Peran Pemerintah Kulon Progo dalam mengatasi konflik kepentingan antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), sehingga peneliti

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 1997.

² Makrus dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 44.

meneliti hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut baik pola relasi seperti strategi penyelesaian konflik, resistensi PPLP, latar belakang penerimaan dan penolakan penambangan, keterlibatan pihak luar, dan pengorganisasian masa, yang berlokasi di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

2. Konflik Kepentingan

Konflik merupakan percekocokan, perselisihan, dan pertentangan baik antar individu maupun kelompok, sedangkan kepentingan itu sendiri berarti keperluan, kebutuhan yang didahulukan yang dianggap latar belakang dari pengambilan keputusan. Dengan kata lain konflik kepentingan merupakan perselisihan, pertentangan, dan percekocokan baik antar individu maupun kelompok yang dimana kedua belah pihak yang berkonflik memiliki keperluan, kebutuhan, dan maksud tujuan sendiri-sendiri yang umumnya bertolak belakang.³ Dalam penelitian ini konflik yang berkepentingan adalah PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan bisnisnya yang mengutamakan keuntungan, Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dengan mengutamakan kelestarian alamnya dan Pemerintah Kulon Progo untuk kepentingan kemajuan Daerah.⁴

3. PT Jogja Magasa Iron (JMI)

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 1997

⁴ Hasil wawancara Dengan Bapak Made Sekertaris Kecamatan Wates Selasa 23 Februari 2015 jam 11:30

jumlah saham yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu orang yang mempunyai tagihan terhadap PT tidak dapat langsung menagih kepada para pemegang saham, melainkan kepada PT, sebab PT adalah badan hukum.⁵ Dalam hal ini PT yang diteliti adalah PT Jogja Magasa Iron (JMI), yang dimana merupakan perusahaan Join Venture antara PT Jogja Magasa Mining (JMM) perusahaan milik keluarga kraton dan perusahaan Indomines Ltd dari Australia. Kedua perusahaan inilah yang membiayai operasi dari PT Jogja Magasa Iron (JMI).⁶

4. Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)

Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya terikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kental yang didasari rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah ditakdirkan contoh keluarga, kekerabatan, ketetanggaan dan ikatan-ikatan khusus lainnya. Sedangkan petani lahan pantai yaitu petani yang bercocok tanam di kawasan lahan pantai yang sebagian besar bermediakan pasir.⁷ Dalam hal ini penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) di Kabupaten Kulon Progo khususnya Desa Karangwuni Kecamatan Wates.

⁵ Yudith, "*Pengertian PT*", <http://yudithtesalonika.blogspot.com/2011/06/pengertian-pt.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2015

⁶ Website Jogja Magasa Iron, "*Sejarah Perusahaan*", <http://www.jmi.co.id/id/his.html/> diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

⁷ Definisi.org, "*Macam-macam Kelompok Sosial Menurut Para Ahli*", <http://definisi.org/macam-macam-kelompok-sosial-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 26 Januari 2015

B. Latar Belakang

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang dimana memiliki ciri khas dan keunikan tertentu baik dari adat, maupun budayanya. Selain disebut kota pendidikan Yogyakarta juga memiliki julukan daerah istimewa yang dimana gelar keistimewaan ini diberikan oleh pemerintah pusat yaitu negara Republik Indonesia. Keistimewaan tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tertuang dalam Undang-undang No 13 tahun 2012 yang membahas mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkat keistimewaan tersebut pemerintah Yogyakarta berhak mengatur urusan pemerintahannya sendiri baik pemilihan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu pemerintah Yogyakarta juga berhak mengatur kelembagaan Pemerintah Daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruangnya.⁸

Dengan adanya keleluasaan tersebut Yogyakarta dituntut untuk mandiri dalam mengelola daerahnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat dan banyaknya masyarakat yang masih tinggal dibawah garis kemiskinan membuat kinerja pemerintah Yogyakarta semakin keras. Perlunya pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan pajak daerah, membuat pemerintah melakukan kontrak terhadap perusahaan, baik perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing. Semua yang dilakukan tersebut untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemajuan masyarakat sekitar terutama daerah yang masih tertinggal. Salah satu daerah yang masih tertinggal adalah Kabupaten Kulon Progo dengan pendapatan

⁸ Undang-Undang No 13 tahun 2012, pasal 7 ayat 2 tentang kewenangan keistimewaan DIY.

Rp 62,39 M pada tahun 2011, dengan perbandingan dengan pendapat daerah lain seperti Bantul sejumlah Rp 88 M, Sleman Rp 140,63 M, Gunung Kidul Rp 41 M.⁹ Kemudian pemerintah pusat melakukan perjanjian kepada salah satu perusahaan asing yang dilimpahkan ke pemerintah daerah yaitu Kulon progo. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan perusahaan Australian Kimberly Diamond Limited, kerjasama tersebut meliputi penelitian pasir besi di kawasan pesisir pantai selatan karena pemerintah dan keluarga keraton mengetahui bahwa potensi biji besi yang ada disepanjang pantai tersebut sangatlah besar.

Pihak asing yang tertarik untuk bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengelola pasir besi tersebut yaitu Perusahaan Indomines Ltd dari Australia dan tidak lama kemudian pada tanggal 12 Oktober 2005 diterima surat Kuasa Pertambangan No. 008/KPTS/KP/EKPL/X/2005 atas nama PT Jogja Magasa Iron sekaligus sumber dana, PT Jogja Magasa Iron (JMI) ini merupakan perusahaan Join Venture antara PT JMM (Jogja Magasa Mining) dan Indomines Ltd dari Australia. Dimana anggota dari PT JMM adalah keluarga kraton pada jajaran ningrat seperti Lutfi Heyder, GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun, BRMH Hario Seno dan Imam Syafi yang berdiri pada tanggal 6 Oktober 2005, kemudian status Kuasa Pertambangan meningkat menjadi Kontrak Karya pada tanggal 4 November 2008, dengan luas area 2.987,79 Ha, yang letaknya di sepanjang pantai antara Sungai Progo dan Sungai Serang.¹⁰

⁹ Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 148.

¹⁰ Website Jogja Magasa Iron, “*Sejarah Perusahaan*”, <http://www.jmi.co.id/id/his.html/> diakses pada tanggal 15 februari 2014

Diatas tanah tersebut sekarang sudah berjalan penambangan biji besi. Penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. Jogja Magasa Mining Yogyakarta dan Indo Mines Limited Australia di sepanjang pesisir pantai selatan Kulon Progo dengan luas kurang lebih 39.600.000 meter persegi, panjangnya sekitar 22 Km dan lebar sekitar 1,8 Km dari bibir pantai, terdiri dari lahan pertanian dan rumah penduduk yang dihuni oleh penduduk kurang lebih 30.000 Jiwa. Penambangan ini menimbulkan sengketa kepentingan hak atas tanah dan konflik sosial penolakan pendirian tambang pasir besi oleh ribuan warga beberapa desa yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan sampai hari ini terus berjuang untuk mempertahankan tanahnya.¹¹ Hal ini menimbulkan penolakan dari rakyat dan terjadi konflik. Konflik menurut Weber adalah perkelahian, peperangan atau pertentangan dan terjadi konfrontasi fisik antara kedua belah pihak.¹² Konflik tersebut timbul karena aspirasi dari rakyat yang menolak sesuatu yang mereka anggap merugikan,¹³ dalam hal ini adalah pertambangan pasir besi.

Dari lahan pantai sepanjang 22 km itu dalam sejarahnya diklaim sebagai tanah Paku Alam Ground (PAG), sementara petani setempat 30 tahun yang lalu mengenalnya sebagai tanah oro-oro tandus yang terlantar dan bahkan tak bertuan, selain itu juga sangat sulit ditanami. Petani dengan uji cobanya berhasil merubah lahan pantai yang dulunya pasir tandus telah berubah menjadi lahan pertanian yang subur dan dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti cabe, semangka,

¹¹ Website Kulon Progo, "*Sejarah Berdirinya Kulon Progo*", <http://www.kulonprogo.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014

¹² Dean G. pruit dan Jeffry Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9

¹³ *Ibid.*, hlm.28

terong, melon dan sayuran, sekarang daerah ini menjadi penghasil cabe, semangka, dan melon terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persolannya adalah, setelah hamparan pasir yang subur dan menjadi mata pencaharian warga sekitar itu, kini lahan pantai dirubah oleh pihak Pemerintah menjadi pertambangan besi yang bernilai triliunan rupiah.¹⁴ Padahal bila dilihat secara fisik petani dan masyarakat tersebut sudah mandiri dan berdaya dari hasil pertaniannya tersebut.

Berdasarkan dari pengukuran yang dilakukan warga masyarakat berdasarkan peta wilayah desa jika dihitung lebar 1,8 km dari bibir pantai dan panjang 22 km maka bukan hanya lahan pertanian namun perumahan warga juga akan tergusur, padahal sebagian besar warga sudah mempunyai sertifikat hak milik yang secara hukum seharusnya diberikan perlindungan oleh negara bukan malah diserahkan kepada asing dalam hal ini Australia untuk di eksploitasi sumber daya alamnya tanpa memperhatikan dampak dampak negatif yang timbul setelah adanya proyek tersebut, sementara itu masyarakat tidak mendapatkan kejelasan bila mereka digusur nanti apakah akan mendapat ganti rugi yang sesuai atau akan direlokasi ketempat yang tentu saja tak sama dengan yang mereka tempati sekarang.¹⁵

Bahkan setelah perusahaan itu beroperasi perusahaan tambang itu belum sepenuhnya terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tambang.

¹⁴ Anthoni kurniawan, *Kedudukan Tanah Pakualaman (Paku Alaman Ground) Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Penambangan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai Di Kabupaten Kulonprogo*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm.7.

¹⁵ Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 155.

Banyak bukti bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang sekadar menambang disuatu daerah tanpa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat yang ada. Kontribusi dapat dikelompokkan menjadi dua hal, pertama adalah kontribusi ekonomi, kedua adalah kontribusi sosial. Kontribusi ekonomi diwujudkan dengan mempekerjakan penduduk sekitar atau memberik kesempatan berusaha yang terkait dengan tambang tersebut. Perusahaan biasanya enggan mempekerjakan penduduk daerah tambang karena berpendidikan rendah dan tidak cukup terampil terutama di bidang penambangan. Pihak pemerintah daerah juga kurang peduli karena hanya menyediakan lahan tambang tanpa mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal terlebih dahulu. Sedangkan kontribusi sosial diwujudkan melalui program-program CSR (*corporate social responsibility*), yang mana kita ketahui belum signifikan dan berjalan dengan baik. Hanya beberapa perusahaan yang menjalankan serius CSR nya dan bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal.

Lahan tambang seringkali juga berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Banyak kasus tambang yang menggusur sumber pendapatan masyarakat sekitar. Tergusurnya kepentingan rakyat kemudian memicu konflik baik fisik maupun batin antara rakyat dengan perusahaan tambang. Keberadaan tambang yang bermasalah dapat juga dipandang sebagai memenangkan kepentingan korporasi atas kepentingan rakyat jelata. Sehingga tidak heran ketika rakyat bersuara keras terhadap keberadaan tambang yang ada di daerahnya. Dengan

adanya hal tersebut seharusnya pihak Pemerintah yang harus berperan aktif untuk mendamaikan kedua kubu yang bergejolak.¹⁶

Berangkat dari beberapa fakta dan premis di atas keberadaan tambang Pasir Besi di pesisir Kulon Progo tersebut terus menuai pro dan kontra hingga sekarang. Fakta pertama mengenai kemudahan memperoleh izin pendirian maupun pengoprasian tambang di daerah tidak serta merta membuat Bupati Kulon Progo pada waktu itu Toyo Santosa Dipo menjadi pihak yang bertanggung jawab. Proyek tersebut merupakan limpahan dari pusat ke daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo. Jadi bukan investor yang melobi pemerintah daerah. Melainkan proyek tersebut, seperti proyek-proyek besar di Kulon Progo lain, direncanakan melalui otoritas dan wewenang Pemerintah Pusat. Daerah hanya menjadi penerima dan pemberi izin proyek saja. Ditambah lagi, sulit untuk merencanakan sesuatu seenaknya di daerah Jawa karena sudah banyak pihak yang mengawasi. Jadi, proyek Pasir Besi di Kulon Progo bukan proyek bawah meja yang memanfaatkan pendeknya birokrasi izin tambang.¹⁷

Setelah berjalanya proyek tersebut bukan berarti proyek tersebut dapat diterima begitu saja karena masih banyak hal yang dipermasalahkan yaitu mengenai masyarakat yang kontra akan pendirian perusahaan tersebut. Selain itu juga karena proyek tersebut mengancam kelestarian lingkungan pesisir sebagai ekosistem maupun penahan gelombang laut bahkan proyek tersebut telah mengusur mata pencaharian petani lahan pantai yang selama ini

¹⁶ Lilik Prasaja, “Serial Konflik Tambang- Pasir Besi di Kulon Progo”, <http://macaronn51.blog.fc2blog.us/blog-entry-428.html/diakses> pada tanggal 15 Februari 2014

¹⁷ Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 154

menggantungkan hidupnya dari pertanian di kawasan tambang, yang lebih tragis lagi belum jelas apakah tambang tersebut akan menguntungkan bagi rakyat Kulon Progo secara luas.¹⁸

Mengingat konflik yang terus berkejolak perlunya penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi dan memfasilitasi untuk menyelesaikan konflik tersebut karena dalam permasalahan tersebut pemerintah harus berperan aktif, selain itu juga pemerintah juga sebagai pemegang kebijakan yang ada, sehingga nantinya konflik tersebut dapat terselesaikan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)*

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah resistensi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap kebijakan penambangan pasir besi yang dilakukan PT Jogja Magasa Iron (JMI)?
2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi konflik kepentingan antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)?

¹⁸ Lilik Prasaja, "Serial Konflik Tambang- Pasir Besi di Kulon Progo", <http://macaronn51.blog.fc2blog.us/blog-entry-428.html/diakses> pada tanggal 15 Februari 2014

3. Bagaimanakah hasil strategi pemerintah dalam mengatasi konflik kepentingan antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji lebih dalam tentang resistensi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap kebijakan pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT JMI.
- b. Mendiskripsikan strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik kepentingan antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).
- c. Mendiskripsikan hasil strategi pemerintah dalam mengatasi konflik kepentingan antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada peran yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi konflik antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) baik dari segi pola relasi yang meliputi kerja sama pemerintah dengan PT JMI, strategi penyelesaian konflik oleh pemerintah, resistensi PPLP, latar belakang penerimaan dan penolakan penambangan, keterlibatan pihak luar, dan pengorganisasian masa. Sehingga hasil dari

penelitian ini bisa dijadikan kajian baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. Selain itu juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini, beberapa penelitian itu adalah :

Pertama, Anthoni kurniawan tahun 2011 yang meneliti tentang "Kedudukan Tanah Pakualaman (Paku Alaman Ground) Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Penambangan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai Di Kabupaten Kulonprogo" fokus dari kajian ini adalah menguraikan tentang permasalahan yang berhubungan dengan Kedudukan Tanah Pakualaman (Paku Alaman Ground) Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Penamabangan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai Kulon Progo. Selain itu penelitian itu menguraikan tentang dasar-dasar teori penyebab terjadinya konflik tersebut.¹⁹ Pada penelitian pertama fokus kajiannya lebih mengarah kepada setatus kepemilikan tanah sepanjang pesisir pantai selatan yang dimana dijelaskan tanah tersebut milik Pakualaman Yogyakarta.

Kedua, Wahyono Setyawan pada tahun 2012 , "Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan

¹⁹ Anthoni kurniawan, *Kedudukan Tanah Pakualaman (Paku Alaman Ground) Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Penambangan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai Di Kabupaten Kulonprogo*, skripsi tidak diterbitkan, (Universitas Islam Indonesia, 2009).

Panjatan Kabupaten Kulon Progo). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi konflik, bentuk-bentuk konflik akibat penambangan pasir besi, dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik penambangan pasir besi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰ Fokus penelitian yang dilakukan oleh Wahyono ini lebih meneliti konflik dan dampak penambangan yang dilakukan oleh PT Jogja Magasa Iron.

Ketiga, Sopa Ismail tahun 2011 ,” *Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*”. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas penambangan dalam perspektif filsafat hukum islam. Dalam hal ini peneliti menggunakan tujuan hukum Islam atau Maqasid asy-Syariah, yang merupakan bagian dari Filsafat Hukum Islam sebagai teori untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga peneliti melihatnya dengan teori memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²¹ Penelitian ketiga ini sedikit berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian tersebut dalam penyelesaian konflik berdasarkan ilmu *kesyari’ah an* sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah kepada peran pemerintah dalam mengatasi konflik saja.

Keempat, Perpustakaan UGM, i-lib tahun 2012, “*Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo*”

²⁰ Wahyono Setyawan, *Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi: Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo*, skripsi tidak diterbitkan, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

²¹ Sopa Ismail , *Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Skripsi thesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Jurnal i-lib UGM. Penelitian ini mengambil metode kualitatif dan bertujuan untuk mengobservasi keunikan yang ada dalam konflik pasir Besi.²² Dalam penelitian ini berfokus pada pro dan kontra dalam penambangan pasir tersebut. Hal ini sedikit beda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokus kajian penelitian tersebut terletak pada konflik dan keunikan yang ada dalam konflik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada konflik dan penyelesaian yang dilakukan pemerintah.

Kelima, Muryanti dkk tahun 2013, “Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan”, buku ini berisikan mengenai hasil dari penelitian yang dimana titik fokusnya adalah teori konflik dan konflik agraria dipedesaan salah satunya juga membahas konflik pasir besi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Buku ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan perbedaannya hanya pada ruang dan jangkauan yang dilakukan yaitu lebih luas penelitian yang dilakukan daripada pembahasan pasir besi yang ada pada buku tersebut. Buku tersebut hanya membahas mengenai dinamika dan dampak kemunculan konflik saja.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan judul *Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)* ini lebih mengarah kepada peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo dalam mengatasi konflik tersebut baik strategi resolusi konflik maupun tindakan yang dilakukan pemerintah. Letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian di atas jelas berbeda baik dari segi fokusnya maupun kajiannya.

²² Website Universitas Gajah Mada, <http://repository.ugm.ac.id/id/eprint/28908>, diakses pada tanggal 09 September 2014.

F. Kerangka Teori

1. Resistensi dan Aspirasi Masyarakat

Resistensi merupakan bentuk respon dan perlawanan terhadap peristiwa yang dianggap sebagai ancaman bagi kelompok maupun individu yang harus dihilangkan. Resistensi tersebut biasanya berkaitan dengan kebijakan maupun proyek tertentu yang dianggap merugikan masyarakat, masyarakat yang merasa rugi inilah yang melakukan resistensi. Apabila dikaitkan dengan teori *rational choice* akan dapat diketahui bahwa setiap orang melakukan tindakan berdasarkan untung dan ruginya. *Teori Rational Choice* merupakan teori dalam pengambilan keputusan yang bersifat masuk akal dan logis, dalam teori ini dijelaskan mengenai asumsi manusia dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Dalam asumsi pokoknya dijelaskan bahwa manusia memiliki sifat dimana dalam pengambilan keputusannya didasarkan atas untung ruginya. Adapun premis-premis dasar dari teori rational choice sebagai berikut:²³ *Pertama*, manusia memiliki konsistensi dalam berfikir terutama dalam menjalankan logikanya. *Kedua*, manusia memiliki seperangkat preferensi yang bisa mereka pahami dan akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, tatanan preferensi tersebut berdasarkan pada prinsip memaksimalkan manfaat yang ada dan meminimalkan resiko. *Keempat*, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat egois.

Dari premis tersebut dapat diturunkan menjadi dua, yaitu premis dari sisi permintaan dan penawaran dimana turunan ini menjadi alasan seseorang

²³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2004), hlm. 155

memilih dan bertindak. Sisi permintaan dimana dalam asumsinya permintaan diajukan atas keinginan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi seorang penawar. Sedangkan penawaran dilakukan oleh penguasa atas yang di perebutkan, dimana disini dilakukan penawaran-penawaran yang pada dasarnya juga berusaha untuk bermanfaat dan menguntungkan bagi penawar. Dalam hal ini penawar dan peminta memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan yang bermanfaat bagi mereka sendiri.²⁴

Selain itu mengeluarkan Aspirasi atau pendapat merupakan hak bagi setiap manusia, sedangkan hak sendiri menurut Jim dan Frank merupakan acuan dari prinsip pandangan dari kesetaraan.²⁵ Sehingga seseorang dapat dikatakan setara bila hak-haknya diakui dan dihargai oleh orang lain. Setiap individu menggunakan haknya untuk mempengaruhi dan meraih kekuasaan dan mendistribusikan kepada kaum yang dikuasainya.²⁶ Sedangkan setiap aspirasi menggambarkan kepentingan dari setiap golongan, menurut Dahrendorf golongan atau kelompok tersebut dibagi menjadi tiga yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik, kelompok semu merupakan anggota dari kelompok kepentingan.²⁷ Hal ini biasa dilakukan oleh kaum kapitalis terhadap kaum kecil yang dimana dalam melakukan perluasan lahanya seringkali mengenai lahan milik masyarakat lokal. Oleh karena itu sering sekali aspirasi dan protes dilontarkan masyarakat lokal yang merasa

²⁴ *Ibid.*, hlm. 155

²⁵ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 116.

²⁶ *Ibid.*, hlm 130.

²⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2004), hlm. 156.

ditindas, aspirasi juga kerap dilontarkan untuk pemerintah yang tidak bisa mengatasi dan melindungi masyarakat lokal tersebut. Dengan adanya aspirasi tersebut diharapkan pemerintah dapat melindungi rakyatnya yang sedang tertindas dan sekaligus berlakunya kesetaraan sosial, masyarakat yang berpengaruh dan mengeluarkan aspirasinya itu sering disebut *Civil Society*.

Pengertian *Civil Society* sendiri menurut Jean L. Kohen dan Andrew Arato (1992) adalah “*Modern Civil Society is based on egalitarian principle and universal inclusion experience in articulating the political will and in collective decision making is crucial to the reproduction of democracy*”. *Civil Society* yang dimaksudkan adalah suatu masyarakat sipil yang didasari oleh kesetaraan dan selain itu juga masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan umum serta masyarakat yang didasari oleh demokrasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri. Dalam kampanyenya John Locke selalu membela kelompok masyarakat yang tertindas terutama oleh kebijakan negara. Negara harus bisa mensejahterakan rakyatnya dengan memberi kebebasan berdemokrasi.²⁸

Menurut Locke kekuasaan negara pada dasarnya terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikaninya. Jadi, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan inilah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang

²⁸ Tumar Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemda Melalui Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, (Bandung: Pusat Studi Pemerintahan Daerah 2008), hlm 19

terancam bahaya perang, untuk itu mereka memilih bersatu di dalam negara.²⁹ Sedangkan menurut J. Rhee Baum kecepatan dan kualitas respon pemerintah dalam menanggapi aspirasi yang dituntut oleh publik menjadi ukuran pemerintahan yang baik juga³⁰.

Selain itu pemerintah juga harus tahu dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 27-34. Berikut hak-hak warga negara Indonesia³¹: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

²⁹ *Ibid.*, hlm 20

³⁰ Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.263.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27-34 tentang hak dan kewajiban warga Indonesia.

2. Strategi Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik merupakan usaha untuk memecahkan maupun menyelesaikan konflik. Dalam penyelesaian konflik tentunya banyak cara maupun strategi yang dilakukan, salah satunya adalah model yang ditawarkan Jim Ife dan Frank Tesoriero menjelaskan dalam beberapa ketrampilan memfasilitasi yang dimana meliputi:³² **Pertama**, semangat sosial yang dimana seorang pemecah konflik (pemerintah) memberikan semangat dan memberikan inspirasi, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan, dan memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang diinginkan yaitu memecahkan masalah secara bersama-sama. **Kedua**, mediasi dan negoisasi dalam model ini pemerintah berperan sebagai mediator yang dimana mempertemukan kedua belah pihak yang bertentangan sehingga nantinya terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa ada ikatan dari pihak ketiga yaitu pemerintah.

Ketiga, membangun konsensus, hal ini adalah perluasan dari model mediasi yang dimana dalam kesepakatannya nanti dijalin kerjasama antar kedua belah pihak dengan perjanjian tertentu sehingga konflik akan terselesaikan. **Keempat**, fasilitasi kelompok dalam hal ini pemerintah dapat memfasilitasi kelompok yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik misalnya disediakanya tempat atau cara-cara tertentu dalam rangka perdamaian. **Kelima**, pengorganisasian pemerintah segera mengatur kedua belah pihak agar tidak

³² Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.559-578.

lagi terjadi konflik yang berkepanjangan kontrol pemerintah sangatlah penting dalam hal ini, sehingga konflik segera ditangani dan diselesaikan.

Selain itu menurut Dean G Pruitt dan Jeffry strategi menghadapi konflik ada lima yaitu *Contending* (Perdebatan), *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), *Yeilding* (Pihak salah satu mengalah), *Inaction* (didamaikan), dan *Withdrawing* (salah satu menarik diri secara permanen dari konflik tersebut).³³

Kelima model dan strategi tersebut akan membantu dalam mengatasi konflik baik bagi pemerintah maupun pemecah konflik lainnya, sehingga konflik yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan dua cara dalam pengendalian sosial dilihat dari prosesnya yaitu Persuasif dan Koersif. Persuasif yaitu merupakan tindakan untuk pengendalian sosial dalam permasalahan dengan membujuk, menyadarkan, bahkan mempengaruhi agar mau bertindak sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan Koersif yaitu penanganan yang dilakukan dengan jalan kekerasan dan memaksa sehingga mau bertindak sesuai norma dan aturan yang ada, hal tersebut dilakukan ketika pendekatan Persuasif gagal dilakukan.³⁴

3. Peran Pemerintah

Menurut Makrus dkk Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang dimana mengatur dan memimpin suatu negara yang tugasnya menegakkan hukum, memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, menyelaraskan

³³ Dean G.Pruitt dan Jeffry Z Rubin, *Teori Konflik sosial*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 59-96

³⁴ Sutomo dkk, *Sosiologi Untuk SMA kelas X Semester 2*. (Malang: Gramedia Indotama,2007), hlm. 90.

kepentingan yang bertentangan. Selain itu negara juga memiliki tugas yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar Republik Indonesia yaitu secara ringkasnya adalah membentuk pemerintahan yang melindungi bangsa tumpah darah indonesia,memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berasaskan pancasila³⁵. Pemerintah dalam peranya senantiasa berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam pernyataan diatas sehingga kesejahteraan masyarakat dan negara akan berjalan semana mestinya, hal ini sejalan dengan peranan pekerja sosial. Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Charles Zastrow (1982), yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1995:7) sebagai berikut:

"Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan".

Dari pengertian di atas, maka seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-

³⁵ Makrus dkk,*Pancasila dan Kewarganegaraan*,(Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 44.

relasi yang ada didalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para pemegang peran, hal ini seperti peran pemerintah pada umumnya.

Dalam hal ini pemerintah sebagai pengembang masyarakat sekaligus pekerja masyarakat juga mempunyai peran yang sangat dibutuhkan sehingga berbagai konflik dapat teratasi, menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero peran pekerja masyarakat dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu:³⁶

Pertama, peran memfasilitasi (*facilitatif roles*) yaitu dimana hal ini berkaitan dengan stimulan dan penunjang dalam pengembangan masyarakat sehingga memperlancar proses dan mempercepat aksi. **Kedua**, peran mendidik (*educational roles*) dalam peran ini pekerja masyarakat berperan aktif dalam menata agenda rencana dan program yang terarah yang menghasilkan ketrampilan, dan pengetahuan sehingga nantinya dapat diajarkan kepada masyarakat. **Ketiga**, peran representasi (*representational roles*) istilah peran ini digunakan untuk seseorang pekerja masyarakat yang dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat. **Keempat**, peran tehnik (*technical roles*) pekerja masyarakat disini memiliki tehnik atau ketrampilan khusus dalam bidang tertentu yang dimana keahliannya itu digunakan untuk mengembangkan masyarakat misalnya, dalam pengaturan uang, manajemen, penelitian, penggunaan komputer semuanya dibutuhkan peran tehnik.

³⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.556-613.

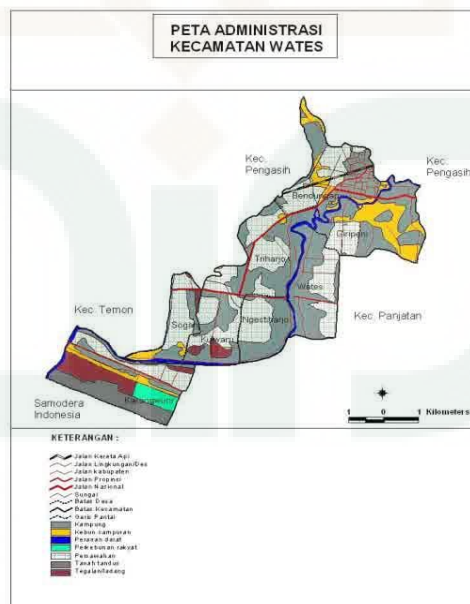
G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasa Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tepatnya di lokasi penambangan PT Jogja Magasa Iron (JMI), Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), Pemerintah Desa Karangwuni, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Desa Karangwuni merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo yang dimana letaknya paling barat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekitar 45 kilo meter dari pusat kota Yogyakarta. Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Januari – 15 April 2015. Berikut peta Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo³⁷.

Gambar 1
Peta Kecamatan Wates



³⁷ Peta kecamatan Wates, www.kulonprogokab.go.id, diakses pada tanggal 27 November 2014 jam 08:10.

2. Subjek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah narasumber asal usul sumber yang diperoleh yang dimana memiliki syarat yaitu orang yang berperan aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti dan sudah cukup lama dalam mengikuti peristiwa tersebut, selain itu mempunyai waktu lama untuk memberikan informasi yang terkait fokus penelitian yang sedang diteliti.³⁸ Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka subyek penelitian ini adalah Pemerintah Kulon Progo baik Pemerintah Desa yaitu Bapak Wasil Khasani selaku Lurah Desa Karangwuni, Pemerintah Daerah yaitu Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo dan ESDM yaitu Bapak Mustofa Ali Muhamat selaku Kepala bidang Pertambangan, selain itu yang berkaitan seperti pihak Kepolisian seperti (Babinkamtibmas). Selain itu juga pihak yang berkonflik yaitu PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

Sedangkan Obyek Penelitian berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini berfokus pada permasalahan dan titik sentra perhatian peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah resistensi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap kebijakan penambangan pasir besi, strategi Pemerintah dalam mengatasi konflik PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), dan hasil dari strategi yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

³⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 131

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi dimana data diuraikan secara naratif bukan diangkakan. Alasan memilih penelitian kualitatif karena hal tersebut merupakan peristiwa sosial yang dimana makna sosial tidak dapat diperoleh dengan hanya menyebar angket seperti penelitian kuantitatif tetapi dibutuhkan pendekatan yang mendalam. Oleh karena itu dengan metode kualitatif kedekatan itu dapat terjadi salah satunya dengan melalui wawancara dan observasi.³⁹

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan mengenai berbagai aspek orang baik individu, kelompok, organisasi, suatu program situasi sosial secara spesifik. Peneliti berusaha untuk menelaah dan mengumpulkan sebanyak mungkin data subyek yang diteliti melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, dokumen dan kejadian kasus secara intensif dan terinci.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan ciri studi kasus yaitu multi sumber, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

³⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 118.

⁴⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 78.

Teknik pengumpulan data tersebut merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif.⁴¹ Berikut penjabaran dari masing-masing teknik: *Pertama*, wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung namun bersifat tidak berstruktur dimana wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaannya dikembangkan pada saat menyesuaikan pada kondisi saat itu. Sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.⁴² Alasan penulis memilih teknik tersebut supaya dalam proses wawancara dapat diperoleh data yang luas dan banyak. Wawancara dilakukan kepada pemerintah kabupaten Kulon Progo baik Pemerintah Desa yaitu Bapak Wasil Khasani selaku Lurah Desa Karangwuni, Pemerintah Daerah yaitu Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo dan ESDM yaitu Bapak Mustofa Ali Muhammad selaku Kepala bidang Pertambangan, selain itu yang berkaitan seperti pihak Kepolisian seperti (Babinkamtibmas). Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Bapak Sukarman Sekjen PPLP dan masyarakat sekitar.

Kedua, observasi, observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang utama dari penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena yang terjadi. Sedangkan teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu

⁴¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2011), hlm.42

⁴²*Ibid*, hlm: 89

mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁴³ Teknik ini digunakan supaya memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung dari lapangan.⁴⁴ Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi ini berfokus pada peran yang dilakukan pemerintah, baik strategi penyelesaian konflik dan resistensi masyarakat disekitar tambang PPLP.

Ketiga, dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, atau piagam-piagam terkait dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian peneliti. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip maka dapat memperkuat informasi awal.⁴⁵ Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia. Laporan tersebut berupa dokumen-dokumen seperti artikel, berita yang ada serta dokumen arsip dari pemerintah yang bersifat umum dan boleh diketahui.⁴⁶

5. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini supaya tidak diragukan kebenarannya. Maka, perlu dilakukannya pemakaian teknik –teknik tertentu . Sebagai alat untuk bisa mengetahui keabsahan penelitian ini dilakukan teknik Triangulasi, tehnik

⁴³ Hadari dan Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ.Press,1995), hlm.100.

⁴⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal.112

⁴⁵ Andi Prastowo , *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2011), hlm. 106-107

⁴⁶ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*,(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.92.

triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau proses.⁴⁷ Selain itu, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴⁸ Oleh sebab itu, penulis memilih teknik triangulasi untuk mengecek kebenaran data. Sedangkan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan kreabilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Data yang sudah didapat baik melalui teknik wawancara dan observasi dicocokkan dengan sumber lain untuk dianalisis ulang. Triangulasi teknik merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang didapat sebelumnya melalui wawancara maka untuk melihat kreabilitas perlu dilakukan observasi. Sedangkan pada triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi yang berbeda. Data dianggap kredibel apabila hasilnya sama.⁴⁹ Berikut contoh perbandingan yang akan dilakukan oleh penelitian: *Pertama*, membandingkan data hasil dari pengamatan yang dilakukan dengan data hasil wawancara (triangulasi tehnik).

⁴⁷ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawaki,2010), hlm.82.

⁴⁸ Andi Prastowo ,*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2011), hlm.269.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.270

Kedua, membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen/sumber lain yang berkaitan (triangulasi sumber). *Ketiga*, membandingkan data hasil pengamatan, wawancara dengan data wawancara dan pengamatan yang sudah ada atau terdahulu (triangulasi waktu)

6. Analisis Data

Analisis data dimulai sejak pengumpulan data berlangsung melalui metode diatas, kemudian data yang bersifat umum diseleksi dan dikhususkan dengan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting serta menentukan pola berdasarkan isunya. Selanjutnya data yang diperoleh dikelompokkan dianalisis berdasarkan isu dan keterkaitanya kemudian disajikan menggunakan teks naratif, tabel, gambar maupun bagan. Langkah yang terakhir berdasarkan data yang sudah ada dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Melalui proses ini penyimpulan dibuat guna untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan⁵⁰. Dengan kata lain analisis data ini menggunakan metode Miles dan Huberman dengan metode reduksi data dengan menempatkan posisi jabatan kedalam bagan, membuat alur dan tahapan dari suatu kegiatan, penyajian data yang berupa data, gambar, serta tabel, dan penarikan kesimpulan dengan terlebih dahulu dibandingkan sehingga data yang disimpulkan lebih akurat kebenarannya.

⁵⁰ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawaki,2010), hlm.129.

H. Sistematik Pembahasan

Sekripsi ini dibagi menjadi empat bagian berikut pembagiannya:

- a. Pada bab I ini merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan
- b. Pada bab II ini memuat profil Daerah dan Kebijakan Penambangan Pasir Besi di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo beserta hal yang bersangkutan dengan penelitian baik letak geografis, mata pencaharian, profil PPLP, profil PT JMI, dan kebijakan penambangan pasir besi.
- c. Bab III pada bab ini menjelaskan Pola Relasi Pemerintah, dengan PT Jogja Magasa Iron (JMI) dan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) baik resistensi PPLP terhadap kebijakan penambangan pasir besi, latar belakang penerimaan dan penolakan penambangan, keterlibatan pihak luar, pengorganisasian masa, serta kolaborasi kerjasama pemerintah dengan PT JMI, strategi penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah, dan hasil dari strategi yang dilakukan pemerintah.
- d. Bab IV yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan refleksi dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Resistensi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap Kebijakan Penambangan Pasir Besi

Setelah melihat berbagai fakta dan data yang sudah dijelaskan, apabila ditarik dan disimpulkan sejarah berdirinya PPLP dilatarbelakangi dengan adanya rencana penambangan dan sekaligus merespon adanya penambangan. Respon dari PPLP tersebut dituangkan dalam tulisan-tulisan, surat kepada pemerintah maupun aksi masa berdemo yang tujuannya adalah menolak bulat adanya penambangan Pasir Besi oleh PT JMI. Dalam melakukan penolakan PPLP dibantu oleh Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) dan juga kelompok-kelompok lain yang mempunyai kepedulian terhadap warga Pesisir Pantai Selatan Kulon Progo. Kelompok-kelompok LSM tersebut diantaranya seperti WALHI, LBH, Pangeran Ajikusumo (Yogyakarta).¹⁴² Selain itu dukungan juga dilakukan oleh Sekelompok orang yang mengatas namakan diri DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY mereka semua melakukan aksi demo menuntut pencabutan izin penambangan pasir besi di Kulon Progo. Selain itu dalam pengorganisasian masa semua dikendalikan oleh PPLP dan aktifisnya dengan memaksimalkan ketua unit desa dan kordinator lapangan.

Latar belakang penerimaan dan penolakan masyarakat dikarenakan cara pandang dan nilai keuntungan kerugian bagi masyarakat itu sendiri

¹⁴² Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 160.

misalnya bagi masyarakat yang menolak kerugian diperoleh seperti hilangnya lapangan pekerjaan dan lahan garapannya dan anggapan akan rusaknya lingkungan dikemudian hari, sedangkan pihak yang menerima dikarenakan nilai ganti rugi yang diperoleh cukup besar pada saat itu Rp 75.000,00 per meter dan dijanjikannya lapangan pekerjaan menjadi karyawan sebagai ganti pekerjaan yang selama ini mereka geluti yaitu bertani.

2. Strategi Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena pada dasarnya Penambangan Pasir besi merupakan Program dari pusat yang Pemerintah Daerah diberikan kepercayaan untuk merealisasikan, namun dengan adanya pro dan kontra tersebut pemerintah harus melakukan pemecahan masalah atau resolusi konflik yang terjadi. Pemerintah dalam menyelesaikan konflik melakukan beberapa hal seperti untuk Pemerintah Desa dengan cara membuat tim sukses yang fungsinya mencari masa pendukung Penambangan Pasir Besi dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat harmoni seperti pengajian shalat berjama'ah dan kegiatan sosial yang tidak membedakan misalnya kerja bakti dan kumpulan. Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan peran memfasilitasi yang termasuk di dalamnya adalah Fasilitasi Kelompok dan Pengorganisasian.

Kemudian penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu dengan menggunakan jalur pendekatan Politik (Hukum) yang bersifat koersif dilakukan oleh ESDM dan jalur pendekatan Moral (empati dan

manusiawi) yang bersifat persuasif, hal tersebut dilakukan Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo beserta timnya. Dalam penyelesaiannya Pemerintah Daerah memiliki peran memfasilitasi, dengan melakukan Mediasi, Fasilitasi Kelompok, *Yelding* yaitu pihak salah satu mengalah dalam hal ini adalah masyarakat desa Karangwuni, dan *Inaction* yaitu didamaikan oleh pemerintah. Untuk penyelesaian yang terakhir yaitu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian mereka melakukan peran sebagai keamanan yang dalam pengamanannya dilakukan secara Koersif bagi masa demo yang melakukan kekerasan dan pengrusakan dan secara persuasif apabila kondisi aman dan dapat dikendalikan.

3. Hasil Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)

Setelah dilakukan berbagai cara maupun metode tersebut konflik yang terjadi di Desa Karangwuni telah usai dan dapat dikendalikan. Berbagai kemanfaatan sudah mulai terasa baik dari fasilitas desa, baik air bersih, jalan, bantuan fisik lainnya, selain itu penerimaan karyawan dari penduduk sekitar juga sudah terlaksana. Hal tersebut menjadi perkembangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Pemerintah Desa Karangwuni karena Desa inilah yang pertama kali berhasil mengatasi Konflik Pasir Besi di Kulon Progo.

B. Saran-saran

Pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan aksi resolusi konflik sangat baik cara maupun strategi yang dilakukan dapat dijadikan contoh Pemerintah yang lain khususnya Pemerintah Desa di kawasan Pesisir Pantai Selatan yang konfliknya sama dengan konflik yang terjadi di Desa Karangwuni yaitu Penambangan Pasir Besi. Namun dalam melakukan Resolusi Konflik atau penyelesaian masalah, masih banyak hal yang bisa dilakukan seperti *Membangun Konsesus, Problem Solving, Contending* dan lain-lain. Mungkin pada dasarnya Pemerintah sudah melakukannya, namun dalam penggalian data tidak dijelaskan maupun diperoleh hal ini dikarenakan keterbatasan waktu penelitian.

Penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah sudahlah dianggap luar biasa dengan perjuangan yang kuat keberhasilan tersebut telah tercapai. Semoga Pemerintah dapat mempertahankan keamanan dan ketentraman di Desa Karangwuni agar konflik tidak terulang kembali. Pengawasan dan kontrol terhadap Perusahaan yaitu PT JMI harus selalu diperketat dan jangan sampai perusahaan menguasai pemerintah. Pemerintah harus kuat dan kebal terhadap usaha Perusahaan yang seringkali mengutamakan keuntungan saja tanpa diimbangi kewajibanya terhadap Pemerintah maupun lingkunganya. Penguatan kerjasama kepada Perusahaan juga harus diatur dan dikembangkan agar nantinya terjalin konsensus dengan baik sehingga Kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat Kulon Progo kususnya Desa Karangwuni dan masyarakat luas sebagai efek rembesan dari program Penambangan Pasir Besi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2011.

Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gama Univ.Press, 1995.

Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Rajawaki, 2010.

Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013.

George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana Persada Media Group, 2004.

Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Narwoko J.Dwi, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Saptono, Bambang Suteng, *Sosiologi untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Phibeta, 2006.

Sutomo dkk, *Sosiologi Untuk SMA kelas X Semester 2*, Malang, Gramedia Indotama, 2007.

B. Dokumen

Dokumen data Monografi nomor kode 34.01.02.2001 Desa Karangwuni bulan Januari-Juni Tahun 2014

Dokumentasi foto di lapangan ketika Observasi pada tanggal 26 Februari 2015 di Balai Desa Karangwuni

Dokumen informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon progo, Rencana Penambangan dan pemrosesan Pasir Besi Menjadi Pig Iron di Kabupaten Kulon Progo.

Dokumen informasi Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kabupaten Kulon Progo.

Dokumen buku data aparaturn pemerintah Desa Karangwuni Tahun 2015

Dokumen presentasi mengenai tanah Paku Alam yang dikeluarkan oleh Kadipaten pakualaman Juli 2013.

Dokumen presentasi mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Rencana Penambangan Dan Pemrosesan Pasir Besi Menjadi Pig Iron di Kabupaten Kulon Progo, Kontrak Karya Antara Pemerintah Dengan PT Jogja Magasa Iron oleh Ir RM. Astungkoro, M.Hum. Sekertaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Rabu 17 Juli 2013.

Dokumen presentasi rencana pembangunan pabrik pig iron si desa karangwuni kecamatan wates kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta, tanggal 16 Juli 2013.

Undang-Undang No 13 tahun 2012, pasal 7 ayat 2 tentang kewenangan keistimewaan DIY.

C. Website

Website Kulon Progo, "Struktur Organisasi Kecamatan Wates",
<http://wates.kulonprogokab.go.id/pages-24-organisasi.html> diakses pada tanggal 31 desember 2014

Website Kulon Progo, "Data Monografi Kecamatan Wates",
<http://wates.kulonprogokab.go.id/pages-24-organisasi.html> diakses pada tanggal 31 desember 2014

Peta kecamatan Wates, www.kulonprogokab.go.id, diakses pada tanggal 27 November 2014

Website Indomines Limited, "Struktur Perusahaan",
<http://www.indomines.com.au/group-structure> diakses pada tanggal 07 Maret 2015 jam 20:22

Dokumentasi Djarot Purbadi, 18 Januari 2009,
<https://realmwk.wordpress.com/page/3/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015 jam 10:14

Surat Keramat PPLP,
<https://kulonprogotolaktambangbesi.files.wordpress.com/2011/01/surat-keramat-2011.jpg> diakses pada tanggal 19 Maret 2015 jam 09:34

Tribun jogja keluaran Selasa 8 November 2011,
<http://jogja.tribunnews.com/2011/11/09/konflik-warga-pasir-besi-berakhir-damai>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 jam 7:30

Koran Jogja, http://krjogja.com/read/142058/page/tentang_kami, diakses pada tanggal 16 Maret 2015 jam 18:56

Foto Suryawijayanti/KBR68H hari Senin, 26 August 2013 jam 13:50
http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2904720_4262.html diakses pada tanggal 19 Maret 2015 jam 09:19

Kompas keluaran 28 March 2011 jam 09:49 aksi penolakan pasir besi
<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/03/28/fenomena-perebutan-lahan-352229.html> diakses pada tanggal 17 Marwt 2015 jam 20:15

Koran Jogja, http://krjogja.com/read/142058/page/tentang_kami, diakses pada tanggal 16 Maret 2015 jam 18:56

Tribun Jogja keluaran Senin, 20 Februari 2012 11:49 WIB
<http://jogja.tribunnews.com/2012/02/20/repdem-tolak-penambangan-pasir-besi-di-kulonprogo-1> diakses pada tanggal 19 Maret 2015 jam 12:00

Tribunjogja/Susilo Wahid Nugroho Demo Repdem Tolak Penambangan Pasir Besi Di Kulonprogo Senin, 20 Februari 2012 11:49 WIB,
<http://jogja.tribunnews.com/2012/02/20/repdem-tolak-penambangan-pasir-besi-di-kulonprogo-1>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 jam 20:15

Surat yang diterima oleh ESDM,
<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/wp-content/uploads/2008/04/scan10023.jpg>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015 jam 10:23

Foto dokumentasi Liputan 6, <http://news.liputan6.com/read/248179/tolak-tambang-pasir-besi-demo-berujung-bentrok>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015 jam 11:18

Wira Sudewa, "Teori Konflik dalam Sosiologi" ,
<http://wirasudewa.wordpress.com/teori-konflik-dalam-sosiologi/> , diakses pada tanggal 24 januari 2014

Webside Jogja Magasa Mining, "Sejarah Perusahaan",
<http://www.jmi.co.id/id/his.html>, diakses tanggal 15 february 2014.

Website Kulon Progo, "Sejarah Berdirinya Kulon Progo",
<http://www.kulonprogo.go.id/sejarah>, diakses tanggal 18 Maret 2014

Lilik Prasaja, "Serial Konflik Tambang- Pasir Besi di Kulon Progo",
<http://macaronn51.blog.fc2blog.us/blog-entry-428.html> diakses tanggal 15 Februari 2014

Website Universitas Islam Negeri Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6224>, diakses pada tanggal 09 September 2014.

Website Universitas Islam Negeri Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6682>, diakses pada tanggal 09 September 2014.

Web side Universitas Gajah Mada, <http://repository.ugm.ac.id/id/eprint/28908>, diakses pada tanggal 09 September 2014.

Yudith, “Pengertian Perseroan Terbatas (PT)”, <http://yudithsalonika.blogspot.com/2011/06/pengertian-pt.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2015

Website Jogja Magasa Iron, “Sejarah Perusahaan”, <http://www.jmi.co.id/id/his.html>/ diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

Definisi org, “Macam-macam Kelompok Sosial Menurut Para Ahli”, <http://definisi.org/macam-macam-kelompok-sosial-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 26 Januari 2015

D. *Jurnal dan skripsi:*

Anthoni kurniawan”Kedudukan Tanah Pakualaman (Paku Alaman Ground) Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Penambangan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai Di Kabupaten Kulonprogo, sekripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Wahyono Setyawan, “Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)”, sekripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta 2012.

Sopa Ismail,” Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Perspektif Filsafat Hukum Islam)”. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.

Perpustakaan UGM, i-lib, “Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo” jurnal, Universitas Gajah Mada, tahun 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. FOTO DOKUMENTASI



Proses Wawancara dengan Bapak Wasul Khasani S.Pd.Jas pada tanggal 10 Maret 2015 di Balai Desa Karangwuni



Simbol Tulisan Desa Karangwuni



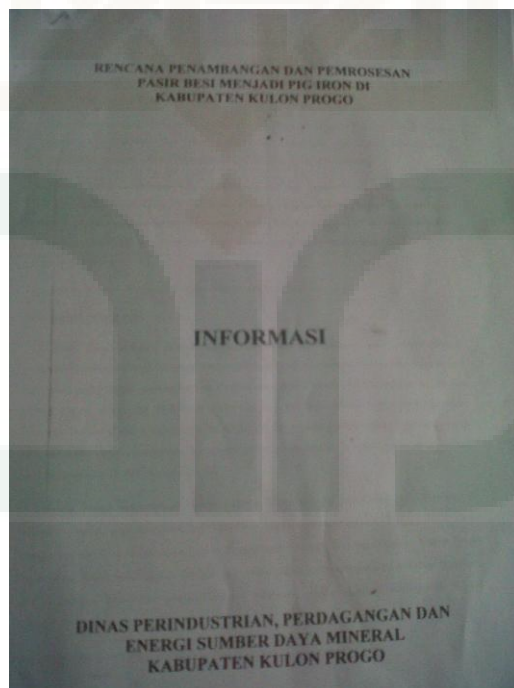
Simbol Tulisan Dinas PerinDag dan ESDM



Proses Wawancara dengan Bapak Bupati Hasto Wardoyo bersama Bapak Mustofa Ali Muhammad Kepala bidang Pertambangan, Rabu 11 Maret 2015



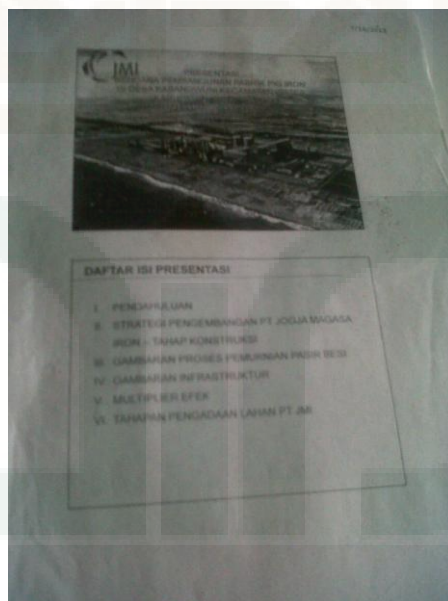
Dokumen data Monografi nomor kode 34.01.02.2001 Desa Karangwuni bulan Januari-Juni Tahun 2014



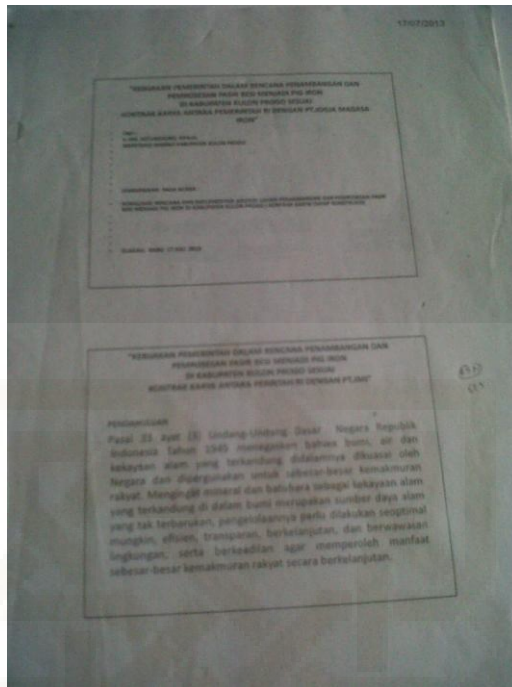
Dokumen informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon progo, Rencana Penambangan dan pemrosesan Pasir Besi Menjadi Pig Iron di Kabupaten Kulon Progo



Dokumen presentasi mengenai tanah Paku Alam yang dikeluarkan oleh Kadipaten pakualaman Juli 2013



Dokumen presentasi rencana pembangunan pabrik pig iron di desa karangwuni kecamatan wates kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta, tanggal 16 Juli 2013



Gambar Dokumen presentasi mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Rencana Penambangan Dan Pemrosesan Pasir Besi Menjadi Pig Iron di Kabupaten Kulon Progo, Kontrak Karya Antara Pemerintah Dengan PT Jogja Magasa Iron oleh Ir RM. Astungkoro, M.Hum. Sekertaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Rabu 17 Juli 2013.

BUKU DATA APARAT PEMERINTAH DESA KARANGWUNI TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	TEMPORAL	STATUS	PENDIDIKAN	KELOMPOK	NO. HP	NO. WA	NO. EMAIL
1	EL KHANSA, S.Pd	1	K.P. 18 Januari 1983	DA.UM	Karya Istim	2.1	081-381-1000	081-381-1000	
2	ABD. HASBULLAH	1	K.P. 28 Maret 1974	DA.UM	Karya Peningkatan	08A			
3	AGYATNO, S.Pd	1	K.P. 28 Mei 1984	DA.UM	Karya Peningkatan	08A			
4	ABUN	1	K.P. 17 Februari 1988	DA.UM	Karya Peningkatan	08A			
5	AGANTO	1	K.P. 18 Agustus 1978	DA.UM	Karya Istim	08A			
6	M. SUKRIAN, S.Pd	1	K.P. 14 Desember 1988	DA.UM	Daklat	08A			
7	ABAGYD	1	K.P. 18 Januari 1976	DA.UM	Karya Istim	08A			
8	ABAYANI	1	K.P. 08 April 1971	DA.UM	Daklat	08A			
9	ABAH	1	K.P. 18 Oktober 1976	DA.UM	Karya Istim	08A			
10	ABOTO	1	K.P. 25 September 1972	DA.UM	Daklat	08A			
11	M. SYAKRIN MUNTALA	1	K.P. 01 Juni 1971	DA.UM	Karya Istim	08A			
12	MUSHAH, S.Pd	1	K.P. 01 Juni 1971	DA.UM	Karya Istim	08A			

MENGETAHUI
MENGENAI
DESA KARANGWUNI

Gambar Dokumen buku data aparatur pemerintah Desa Karangwuni Tahun 2015

B. DATA INFORMAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Wasul Khasani	Kepala Desa
2.	Musthofa Ali Muhammad	Kepala Bidang Pertambangan Perindag Dan Esdm
3.	Hasto Wardoyo	Bupati Kulon Progo
4.	Sukarman	Sekjen PPLP
5.	Dodi	Masyarakat Sekitar Penambangan
6.	Made Arsa Wijaya, S.H	Sekretaris Camat
7.	Si A	Masyarakat Sekitar Tambang

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Daftar pertanyaan untuk pihak Pemerintah baik bapak Wasul Khasani, Mustofha Ali Muhammad dan pak Hasto Wardoyo
 - Bagaimana tanggapan Bapak mengenai konflik Pasir Besi tersebut?
 - Bagaimana sejarah terjadinya konflik tersebut?
 - Apa saja manfaat yang diperoleh dari Penambangan Pasir Besi tersebut?
 - Apa saja bentuk dari penolakan terhadap Kebijakan Penambangan Pasir Besi?
 - Bagaimana usaha atau strategi bapak dalam mengatasi konflik tersebut?
 - Bagaimana hasil dari usaha yang dilakukan?
 - Adakah pihak luar yang terlibat dalam konflik tersebut?
 - Apa harapan bapak kedepan mengenai permasalahan ini?
2. Daftar pertanyaan untuk pihak PPLP
 - Bagaimanakah sejarah berdirinya PPLP?
 - Bagaimanakah struktur organisasi dari PPLP?

- Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PPLP?
 - Apa alasan melakukan penolakan terhadap Penambangan Pasir Besi?
 - Apa saja bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh PPLP?
 - Siapa saja yang mendukung PPLP dalam beraksi?
 - Apa harapan PPLP kedepan mengenai permasalahan ini?
3. Daftar pertanyaan untuk warga sekitar penambangan Desa Karangwuni mas Dodi dan Si A
- Bagaimana tanggapan saudara mengenai konflik Penambangan Pasir Besi?
 - Apa saja yang melatar belakangi penerimaan dan penolakan terhadap Penambangan Pasir Besi?
 - Apa saja manfaat dan kerugian dengan adanya Penambangan Pasir Besi tersebut bagi saudara?
 - Apa harapan saudara dengan adanya Penambangan Pasir Besi tersebut?

D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rudi Sanjaya
 Alamat : Gandri, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo
 TTL : Kota Bumi 14 Maret 1991
 Email : rudi_sanjaya1816@yahoo.com
 Moto hidup : Dengan Seni Hidup Akan Terasa Indah, Dengan Ilmu Hidup Terasa Mudah, Dengan Agama Hidup Akan Terarah.

2. Riwayat Pendidikan

TK Aisyah Temon Wetan 1998
 SDN 1 Temon Wetan 2005
 SMP 1 Temon 2008
 SMA N 1 Temon (IPS) 2011

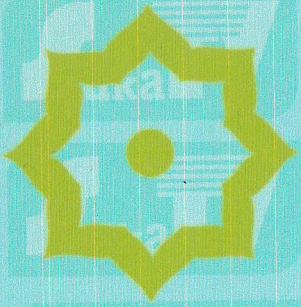
3. Pendidikan Non Formal

Pelatihan Ketoprak Margo Budoyo Kecamatan Temon 2010
 Diklat Banser Kulon Progo Tahun 2013
 Workshop Pengenalan Produksi Siaran Televisi SUKA TV 2011

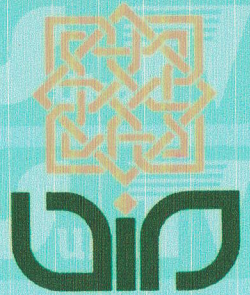
4. Pengalaman Berorganisasi

- Remaja Masjid Arohmah
- Remaja Mushola Al-barokah
- Sekrtaris Karangtaruna Al-Fatah Dusun Gandri
- Bendahara Kelompok Sumber Air Bersih “ Tuk Gandri” Dusun Gandri
- Anggota Kelompok Pertanian “Enggal Makmur” Dusun Gandri
- Anggota Banser Kulon Progo Wilayah Kecamatan Temon
- Tim Pendorong dalam Program Desa Wisata Paker, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul





Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD)
Fakultas Dakwah
Divisi Televisi dan Multimedia



Sertifikat

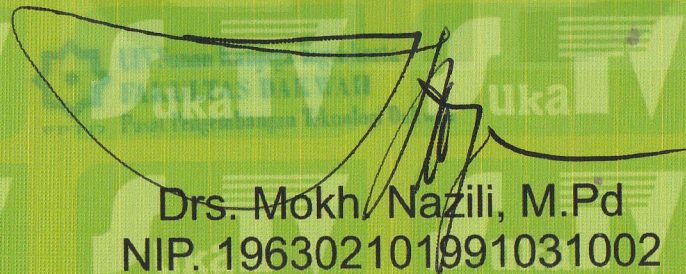
diberikan kepada

RUDI SANJAYA

Sebagai
PESERTA

"WORKSHOP PENGENALAN PRODUKSI SIARAN TELEVISI"
yang dilaksanakan pada 29 Oktober - 20 November 2011

Ketua PPTD



Drs. Mokh. Nazili, M.Pd
NIP. 196302101991031002

Bertifikat

Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2011

diberikan kepada :

NIM.

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2011/2012 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

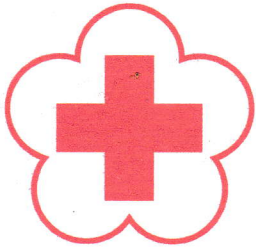
Yogyakarta, 1 November 2011

Kepala Perpustakaan,



M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS

NIP. 19700906 199903 1 012



Palang Merah Indonesia

SERTIFIKAT

Nomor : 31/D-3/Pan.RCE/2-A/XII/2013

Diberikan Kepada :

Rudi Sanjaya

Sebagai

Peserta

Workshop & Seminar Kewirausahaan
"Mewujudkan Relawan yang Tangguh dalam Berwirausaha"
Korps Sukarela
Palang Merah Indonesia
Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tanggal 23 November 2013

Pengurus
Korps Sukarela
Palang Merah Indonesia
Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ketua,

M. Rizal Dhukha Islam
NIA. 02.05.01.04.07.3281.12



Sertifikat

No: 07/P MAN. EXPO/BEM-J/MD/XII/2011

Diberikan kepada:



Sebagai:

PESERTA

SEMINAR EKONOMI

TEMA: "Orientasi Ekonomi Syariah Terhadap Kendali Ekonomi Global"

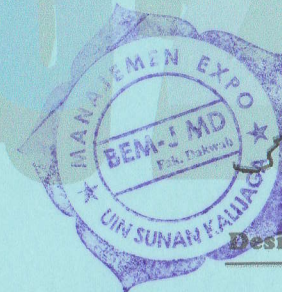
1 DESEMBER 2011

TEATRIKAL DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

Juhanawati
Ketua

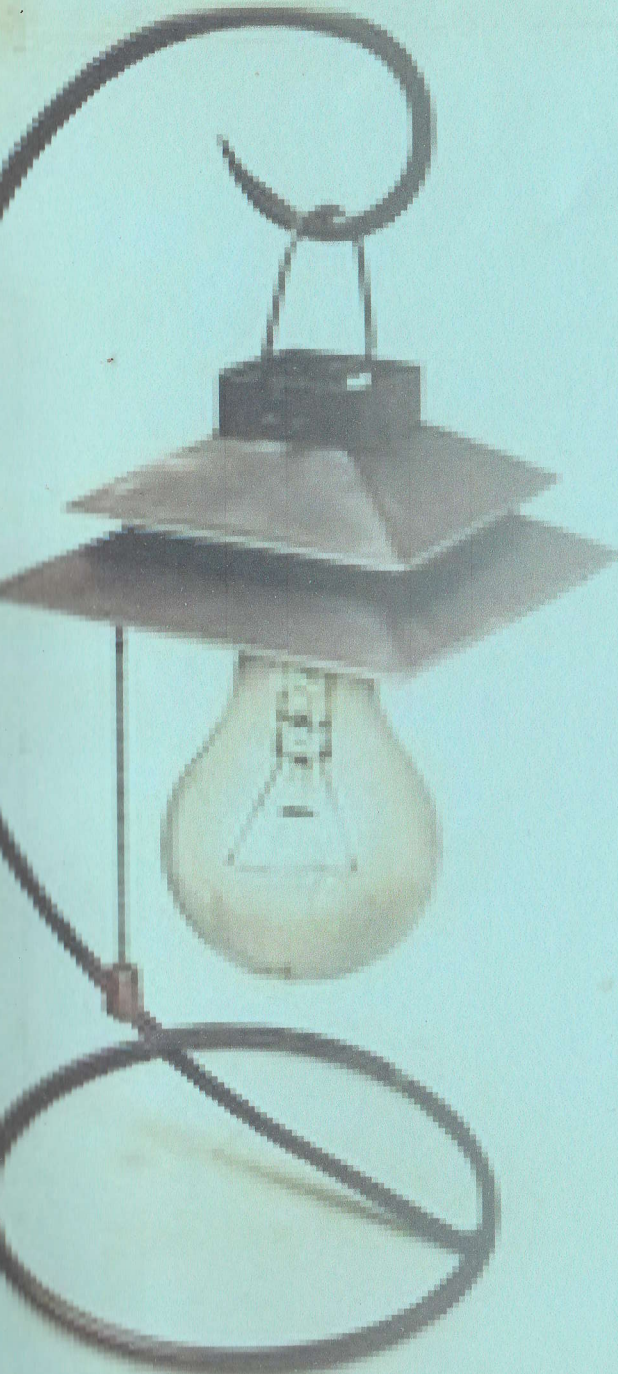

Desiana Ratri Suryandari
Sekretaris

Mengetahui :

Pengurus BEM-J Manajemen Dakwah


Badriyanto
NIM. 09240065

An Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dra. Siti Fatimah, Mpd
NIP. 150267223



**SEMINAR NASIONAL
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH**



Sertifikat

Diberikan Kepada

Sebagai

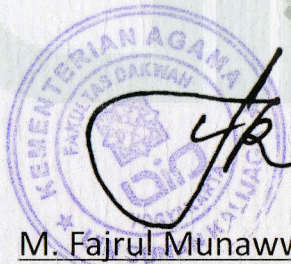
PESERTA

Atas partisipasinya dalam Seminar Nasional Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang bertema
"Meneropong Fenomena Kemiskinan di Indonesia"

Yogyakarta, 29 November 2012



Nur Lela
Ketua Panitia



M. Fajrul Munawwir, M.Ag.
Ketua Jurusan PMI



Rahayu Kurniasih
Ketua BEM-J PMI



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON

Diagam Penghargaan

Nomor : 431/ 397/ 2010

Diberikan kepada :

RUDI SANJAYA

**Sebagai peserta dalam Festival Kethoprak
Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010
Kontingen Kecamatan Temon**

Temon, 3 Agustus 2010



KAMAT TEMON

Dra. SRI UTAMI, M.Hum

NIP. 19670221 199403 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 431 / 501 / 2009

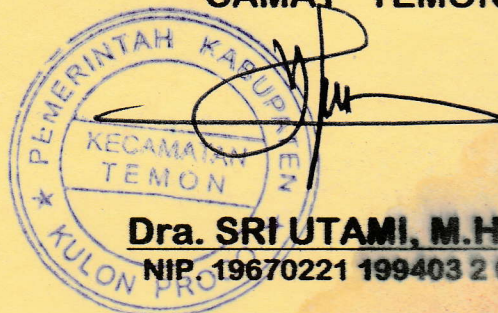
Diberikan kepada :

RUDI SANJAYA

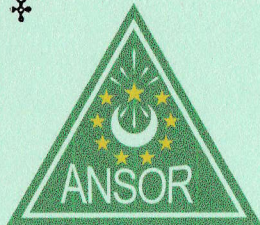
Sebagai peserta kontingen Kethoprak Margo Budoyo
Kecamatan Temon dalam Rangka Festival Kethoprak
Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009

Temon, 10 Oktober 2009

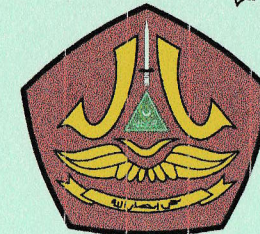
Mengetahui
CAMAT TEMON



Dra. SRI UTAMI, M.Hum
NIP. 19670221 199403 2 005



PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR
BARISAN ANSOR SERBAGUNA
PENGURUS CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN KULON PROGO



SERTIFIKAT

No : 13.a /DB013/PC GP ANSOR/KP/XII/2013

Dengan ini diberikan kepada :

RUDI SANJAYA

Temon, Kulon Progo

Atas Partisipasinya dalam DIKLATSAR BANSER 4-XI tanggal 27 - 29 Desember 2013
di Kompleks Balai Desa Bojong Panjatan Kulon Progo, sebagai :

PESERTA

Ketua PC GP ANSOR Kulon Progo

Didik Komaidi, S.Ag. M.Pd.

Bojong, 29 Desember 2013

Ketua Panitia Penyelenggara

Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si



PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA LAPANGAN
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA

SERTIFIKAT

NOMOR : UIN.02/PMI/PP.009/ 068.a /2015

Diberikan Kepada:

Rudi Sanjaya

NIM : 11230005

Yang telah menempuh Praktek Pemberdayaan Masyarakat (PPM) I dan II selama 800 jam,
dengan keahlian assessment, analisis, perencanaan, intervensi dan evaluasi program.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Ketua Jurusan PMI,



M. Syarifur Rifa'at, M.Ag.
NIP. 199803 1 002

Ketua PPM,

Dr. Azis Muslim, M.Pd
NIP. 19700528 199403 1 002



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

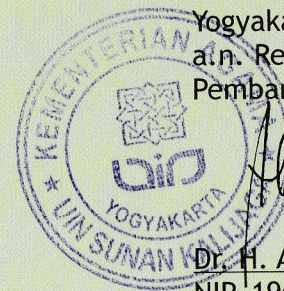
Sertifikat

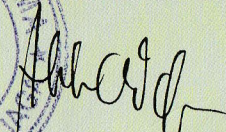
diberikan kepada:

Nama : Rudi Sanjaya
NIM : 11230005
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011
a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan




Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

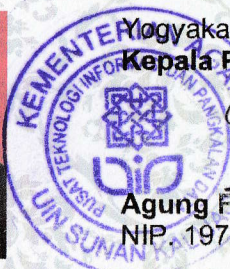


UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : RUDI SANJAYA
NIM : 11230005
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	70	C
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	75	B
4.	Microsoft Internet	95	A
5.	Total Nilai	72,5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 7 Januari 2015
Kepala PTIPD
(Signature)
Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.689/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Rudi Sanjaya
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kota Bumi, 14 Maret 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 11230005
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

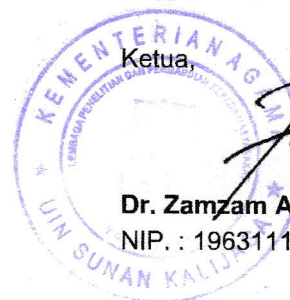
yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Sukoharjo 11
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,17 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014



Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
NIP. : 19631111 199403 1 002



SERTIFIKAT



No. 118.PAN-OPAK.UNIV UIN.YK.AA.09.2011

diberikan kepada :

atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 dengan tema :
Menumbuhkan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika
pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengetahui,


Yogyakarta, 16 September 2011

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

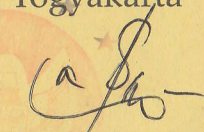
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Panitia OPAK 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Ahmad Rifa'ie, M.Phil
NIP. 19600905 198603 1 006


Abdul Kholid
Presiden


M. Fauzi
ketua


Ach. Sulaiman
sekretaris



شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/1873.a/2014

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Rudi Sanjaya

تاريخ الميلاد : ١٤ مارس ١٩٩١

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ يونيو ٢٠١٤ ،

وحصل على درجة :

٥٤	فهم المسموع
٥٧	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢١	فهم المقروء
٤٤٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكرتا، ٢٣ يونيو ٢٠١٤

المدير

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٠٣ ١٩٩١٠٩ ١٩٦٣١١٠٦





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/1873.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Rudi Sanjaya**
Date of Birth : **March 14, 1991**
Sex : **Male**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **June 20, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

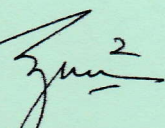
CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	35
Total Score	407

*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, June 23, 2014

Director,


Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

